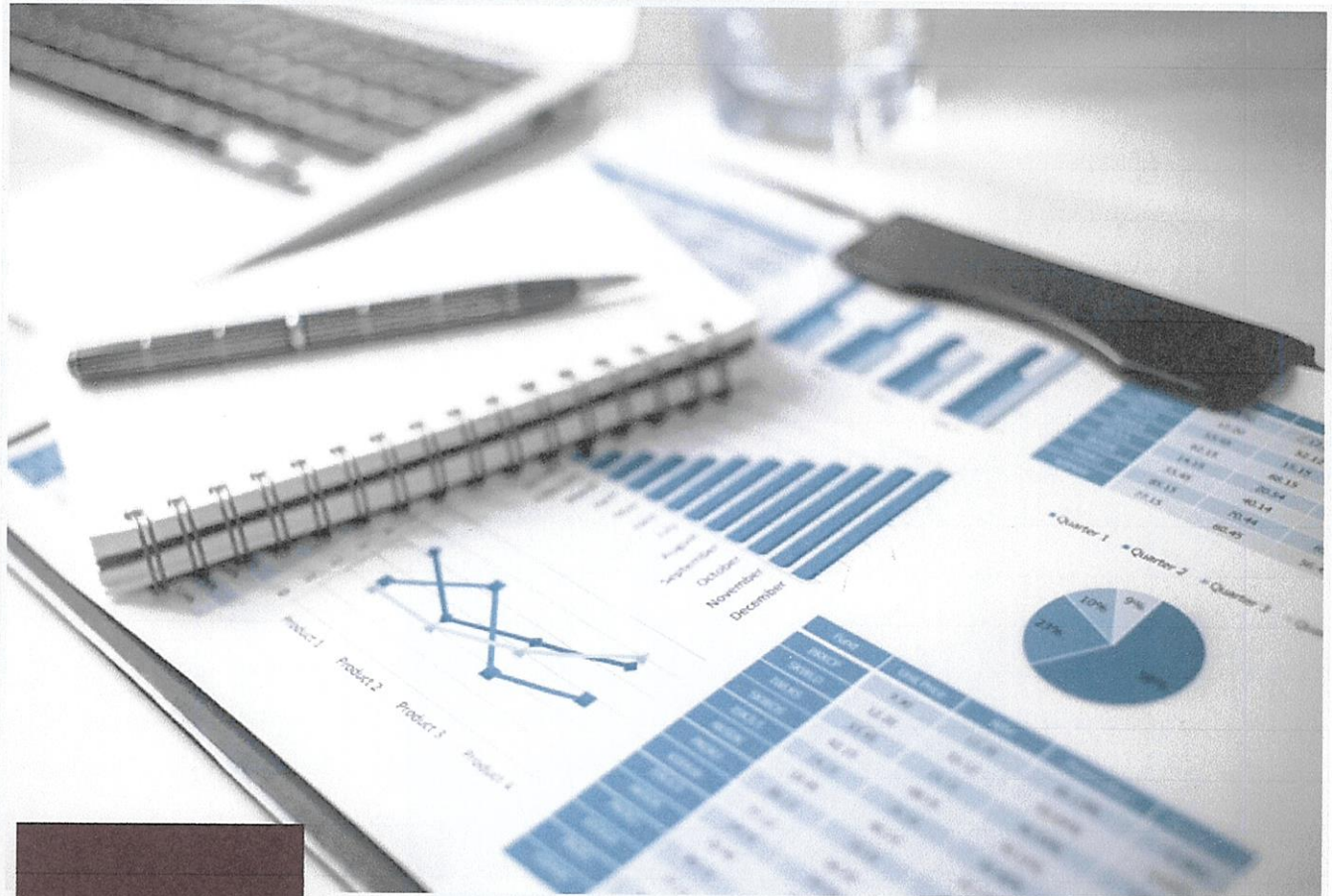




LAPORAN KEUANGAN SEMESTER 1 TAHUN 2025



2025

**PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
(099066)
JALAN SULTAN ABDURRAHMAN NO.89
PONTIANAK**

Telp : (0561)- 734100

| Website: pn-pontianak.go.id

PENGANTAR

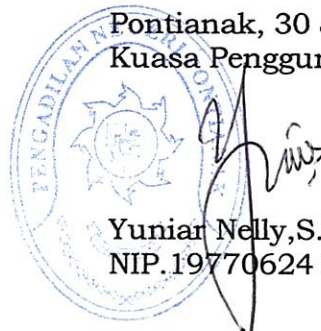
Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Pontianak adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pontianak (099066) Semester 1 Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Pontianak. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pontianak, 30 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran



Yuniar Nelly, S.T., M.M.
NIP.19770624 200604 2 001

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Pernyataan Tanggung Jawab	III
Ringkasan	1
I Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	3
II Neraca	4
III Laporan Operasional (LO)	5
IV Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	6
V Catatan Atas Laporan Keuangan	7
A Penjelasan Umum	7
B Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	18
C Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	25
D Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO)	33
E Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	36
F Pengungkapan Penting Lainnya	41
IV Lampiran dan Daftar Tabel	
A Daftar Tabel	IV
B Daftar Lampiran	V
C Laporan Barang Pengguna	VI
D Laporan Akumulasi Penyusutan Barang	VII
E Laporan BMN di Neraca	VIII
F Laporan BMN di Neraca (Saldo Awal)	IX
G Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	X
H Rekening Koran	XI
I Berita Acara Opname Fisik Persediaan	XII

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Jalan Sultan Abdurahman N0.89

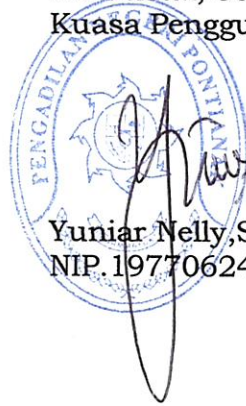
Telp. (0561)-732100, E-mail : pengadilannegeriptk@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pontianak (099066) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester 1 Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, 30 Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran



Yuniar Nelly, S.T.M.M.
NIP.19770624 200604 2 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2025 satker Pengadilan Negeri Pontianak ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester 1 Tahun 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp4.903.914 atau mencapai 36,69 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp13.364.000.

Realisasi Belanja Negara pada Semester 1 Tahun 2025 adalah sebesar Rp9.035.364.809 atau mencapai 62,16 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp14.535.495.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni Semester 1 Tahun 2025.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp55.312.409.364 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp111.255.219; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp55.201.154.145; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.022.195.451 dan Rp54.290.213.913.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/ defisit dari operasi, surplus/ defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/ defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/ defisit-LO,

yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp6.548.066 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp10.694.457.285 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp10.687.909.219, Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0 sehingga Entitas mengalami Defisit-LO Rp10.687.909.219.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari Tahun 2025 adalah sebesar Rp55.947.662.237 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp10.687.909.219 ditambah dengan koreksi-koreksi yang mengurangi nilai ekuitas senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp9.030.460.895 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp54.290.213.913.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai pada 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester 1 Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CAT.	SEMESTER 1 TAHUN 2025				TAHUN 2024
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (DI BAWAH)	%	REALISASI
Pendapatan	B.1					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	13.364.000	4.903.914	(8.460.086)	36	11.267.883
Jumlah Pendapatan		13.364.000	4.903.914	(8.460.086)	36	11.267.883
Belanja	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	11.913.344.000	7.930.640.507	(3.982.703.493)	66	6.309.216.117
Belanja Barang	B.4	2.427.091.000	1.104.724.302	(1.322.366.698)	45	1.027.079.517
Belanja Modal	B.5	195.060.000	0	(195.060.000)	0	0
Jumlah Belanja		14.535.495.000	9.035.364.809	(5.500.130.191)	62	7.336.295.634

II. NERACA

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
NERACA
PER 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	CAT.	Semester 1 Tahun 2025	2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di BendaharaPengeluaran	C.1.1	60.000.000	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.2	817.319	0
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.1.3	817.319	
Persediaan	C.1.4	50.437.900	60.107.100
JUMLAH ASET LANCAR		111.255.219	60.107.100
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	48.759.467.000	54.166.769.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	6.401.620.966	6.401.620.966
Gedung dan Bangunan	C.2.3	13.617.846.700	13.617.846.700
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	9.839.869	9.839.869
Akumulasi Penyusutan	C.2.6	(13.587.620.390)	(13.587.620.390)
JUMLAH ASET TETAP		55.201.154.145	55.894.346.170
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Lain Lain	C.3.1	3.114.864	3.114.864
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2	(3.114.864)	(3.114.864)
JUMLAH ASET LAINNYA		0	0
JUMLAH ASET		55.312.409.364	55.954.453.270
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	960.995.451	5.964.200
Utang yang Belum Ditagihkan	C.4.2	1.200.000	0
Pendapatan Diterima Dimuka	D.4.2	0	826.833
Uang Muka dari KPPN	C.4.2	60.000.000	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		1.022.195.451	6.791.033
JUMLAH KEWAJIBAN		1.022.195.451	6.791.033
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	54.290.213.913	55.947.662

JUMLAH EKUITAS		54.290.213.913	55.947.662
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		55.312.409.364	55.954.453.270

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CAT.	Semester 1 Tahun 2025	Semester 1 Tahun 2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	6.548.066	12.363.194	10.000.000
JUMLAH PENDAPATAN		6.548.066	12.363.194	10.000.000
BEBAN				
Beban Pegawai	D.2	8.852.600.958	7.057.853.446	7.216.000.000
Beban Persediaan	D.3	55.581.500	42.078.300	28.000.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	424.025.206	487.933.757	576.000.000
Beban Pemeliharaan	D.5	651.630.400	552.512.250	340.000.000
Beban Perjalanan Dinas	D.6	17.427.196	32.940.539	47.000.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	718.088.426	718.088.426	711.000.000
JUMLAH BEBAN		10.694.457.285	8.891.406.718	8.921.000.000
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(10.687.909.219)	(8.879.043.524)	(8.910.600.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8	0	0	
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(10.687.909.219)	(8.879.043.524)	(8.910.600.000)
POS LUAR BIASA	D.9	0	0	
Beban Pos Luar Biasa		0	0	
SURPLUS/(DEFISIT) LO		(10.687.909.219)	(8.879.043.524)	(8.910.600.000)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024**

(dalam rupiah)

URAIAN	CAT.	Semester 1 Tahun 2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	55.947.662.237	62.225.668.806
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(10.687.909.219)	(8.879.043.524)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	9.030.460.895	7.325.027.751
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1.657.448.324)	(1.554.015.773)
EKUITAS AKHIR	E.6	54.290.213.913	60.671.653.033

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengadilan Negeri Pontianak

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Visi Pengadilan Negeri Pontianak pada Semester 1 Tahun 2025 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja.

Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pontianak pada tahun 2020 sampai dengan 2025 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Negeri Pontianak. Visi Mahkamah Agung adalah Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, di mana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung RI :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung RI tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Negeri Pontianak sebagai visi dan misinya.

Visi Pengadilan Negeri Pontianak adalah: "Terwujudnya Pengadilan Negeri Pontianak Yang Agung"

Misi Pengadilan Negeri Pontianak adalah:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pontianak.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pontianak.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Pontianak.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Pontianak melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan strategi peningkatan kinerja yaitu:

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.

Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan.

Mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Negeri Pontianak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian procedural manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kantor Kantor Pengadilan Negeri Pontianak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Negeri Pontianak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Semester 1 Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Negeri Pontianak. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Pontianak adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan (LRA)

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perhendaharaan Negara (KPPN), Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

a. **Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,

c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Peyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat	10%

	Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

• Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan

1. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
2. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

• Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar

• Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah;

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang

dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap :

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki

untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 Tahun
Franchise	5 Tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 Tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 Tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 Tahun

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 Tahun
-------------------------------	----------

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Kantor Pengadilan Negeri Pontianak memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran Semester 1 Tahun 2025 sebesar Rp14.535.495.000 Selama Semester 1 Tahun 2025, dilakukan revisi

atas DIPA Awal Satuan Kerja Kantor Pengadilan Negeri Pontianak yang disebabkan adanya Revisi Halaman III Terkait Proyeksi rencana penarikan dana Triwulanan yang telah dilakukan sebanyak 9 (Sembilan) kali . Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I
Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2025
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran Semester 1 Tahun 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB	13.364.000	13.364.000
Jumlah Pendapatan	13.364.000	13.364.000
Belanja		
Belanja Pegawai	11.913.344.000	11.913.344.000
Belanja Barang	2.427.091.000	2.427.091.000
Belanja Modal	195.060.000	195.060.000
Jumlah Belanja	14.535.495.000	14.535.495.000

Catatan :

1. Pengadilan Negeri Pontianak selama Semester 1 Tahun 2025 telah melakukan revisi perubahan DIPA sebanyak 7 Kali
2. Revisi dilakukan dalam hal proyeksi rencana penarikan dana Triwulan I sampai dengan Tahun 2025.
3. Revisi dalam hal pergeseran detail terkait minus dalam belanja pegawai serta pergeseran untuk optimalisasi anggaran.

B.1. Pendapatan

Pendapatan
Rp4.903.914

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp4.903.914. Pengadilan Negeri Pontianak memperoleh pendapatan dari sewa rumah dinas.

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Rp9.035.364.80
9.

Realisasi Belanja instansi pada Semester 1 Tahun 2025 adalah sebesar Rp9.035.364.809 atau 62% dari anggaran belanja sebesar Rp14.535.495.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester 1 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester 1 Tahun 2025
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran Semester 1 Tahun 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	11.913.344.000	7.930.640.507	66
Belanja Barang	2.427.091.000	1.104.724.302	45
Belanja Modal	195.060.000	0	0
Total Belanja Kotor	14.535.495.000	9.035.364.809	62
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0
Jumlah	14.535.495.000	9.035.364.809	62

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pada Tahun 2025 tidak terdapat Pagu Belanja Modal.
2. Penurunan realisasi Belanja Pegawai dikarenakan adanya mutasi dan promosi pegawai Pengadilan Negeri Pontianak ke satker lainnya.
3. Serta peningkatan/percepatan belanja operasional telah sesuai target yang ditetapkan.

Tabel III
Perbandingan Realisasi Belanja
Semester 1 Tahun 2025 dan Semester 1 Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Semester 1 Tahun 2025	Tahun 2024
Belanja Pegawai	7.930.640.507	6.309.216.117
Belanja Barang	1.104.724.302	1.027.079.517
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	9.035.364.809	7.336.295.634

Menurunnya realisasi belanja terjadi di belanja pegawai, belanja barang serta belanja modal.

B.2. Belanja Pegawai

*Belanja
Pegawai
Rp7.930.640.507*
7

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 30 Juni Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.930.640.507 dan Rp6.309.216.117. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Semester 1 Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 5 persen dari . Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Perubahan jumlah PNS pada Semester 1 Tahun 2025 yang mengalami kenaikan karena promosi dan mutasi maupun pensiun.
2. Perubahan Gaji Pokok Pegawai yang mengikuti jumlah ASN dan Kenaikan Tunjangan Hakim.

Tabel IV
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Semester 1 Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi Semester 1 Tahun 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.075.746.120	6.276.614.319	(23,65)
Belanja Gaji dan Pejabat Negara	2.820.928.599	0	100
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	33.965.788	32.603.326	4,01
Jumlah Belanja Kotor	7.930.640.507	6.309.217.645	20,44
Pengembalian Belanja Pegawai	0	1.525	0
Jumlah Belanja	7.930.640.507	6.309.216.117	20,44

B.4. Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp.1.104.724.3
02*

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 30 Juni 2025 dan 30 Juni Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.104.724.802 dan Rp1.027.079.517. Realisasi Belanja Barang Semester 1 Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 7,03 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2024. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Kenaikan Belanja Pemeliharaan sub kelompok akun 5231 , terjadi kenaikan pada pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor dan peralatan dan mesin dikarenakan tingkat kerusakan Gedung dan Bangunan , dan peralatan dan mesin yang meningkat pada Semester 1 Tahun 2025 ini;

Tabel V
Perbandingan Belanja Barang
Juni 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Semester 1 Tahun 2025	Tahun 2024	%
Belanja Barang Operasional	305.984.680	364.654.559	(19,17)
Belanja Barang Non Operasional	1.000.000	20.300.000	(1.930)
Belanja Barang Persediaan	69.077.900	53.632.500	22,35
Belanja Jasa	82.769.729	69.164.569	16,43
Belanja Pemeliharaan	628.464.800	486.687.350	22,56
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	17.427.198	32.640.539	(87,29)
Jumlah Kotor	1.104.724.302	1.027.079.517	7,02
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja	1.104.724.302	1.027.079.517	7,02

B.5. Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp0*

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tidak terdapat Pagu Belanja Modal pada Semester 1 Tahun 2025

Berikut rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Pontianak Semester 1 Tahun 2025 dan Tahun 2024:

Tabel VI
Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Modal
Semester 1 Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Semester 1 Tahun 2025	Semester 1 Tahun 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195.060.000	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja	195.060.000	0	0

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0

Terdapat Pagu Belanja Modal pada Semester 1 Tahun 2025. Adapun perbandingan penambahan tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Semester 1 Tahun 2025	Semester 1 Tahun 2024	%
AC Split 2 PK	92.330.000	0	0
Meubelair	102.730.000	0	0
Sarana Disabilitas	0	0	0
Sepeda Motor	0	0	0
Personal Computer (PC)	0	0	0
Jumlah Belanja	195.060.000	0	0

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0*

Tidak terdapat Pagu Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Semester 1 Tahun 2025 dan Tahun 2024:

Uraian	Semester 1 Tahun 2025	Tahun 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Aset Lancar
Rp111.255.219*

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per 30 Juni 2025 dan 30 Juni Tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp111.255.219 dan Rp60.107.100. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp60.000.000*

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp60.000.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semester 1 Tahun 2025	Tahun 2024
Kas Tunai	19.613.000	215.000
Kas Bank di Bank BRI No. Rek. 653240990661000	39.187.000	0
Kuitansi di Bendahara	1.200.000	59.785.000
Jumlah	60.000.000	60.000.000

C.1.2. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

*Belanja Dibayar
Dimuka
(prepaid) Rp0*

Belanja Dibayar Dimuka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi memmanfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut. Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) pada Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per 30 Juni 2025 dan 30 Juni Tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semester 1 Tahun 2025	Tahun 2024
Belanja Langganan Web Hosting	0	0
Jumlah	0	0

*Persediaan
Rp50.437.900*

C.1.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni Tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp50.437.900 dan Rp60.107.100 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel VII
Rincian Perbandingan Persediaan
Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Persediaan	Semester 1 Tahun 2025	Tahun 2024	%
Barang Konsumsi	40.112.000	60.107.100	(16,09)
Barang Untuk Pemeliharaan	0	0	0
Jumlah	50.437.900	60.107.100	(16,09)

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp55.201.154.1
45

Saldo Aset Tetap Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp55.201.154.145 dan Rp55.894.346.170. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Aset Tetap pada Kantor Pengadilan Negeri Pontianak berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, dan Aset Tetap Lainnya.

C.2.1. Tanah

Tanah
Rp48.759.467.0
00

Tanah yang di miliki Kantor Pengadilan Negeri Pontianak 30 Juni Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp48.759.467.000 dan Rp48.759.467.000.

Mutasi Aset Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel VIII
Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Perolehan 1 Januari 2025	48.759.467.000
Mutasi Tambah :	
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Revaluasi Aset	0
Penghapusan	0
Saldo per 30 Juni Semester 1 Tahun 2025	48.759.467.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni Tahun 2025	0
Nilai Buku per 30 Juni 2025	48.759.467.000

Tabel IX
Rincian Tanah Semester 1 Tahun 2025

(dalam rupiah)

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	2.082 m2	Jalan Sudimoro	8.135.902.000
2	806 m2	Jalan Aliyang GG. Kurnia	1.128.248.000

3	220 m2	Jalan Gusti Hamzah	717.970.000
4	1.990 m2	Jalan Sulawesi	8.167.504.000
5	2.887 m2	Jalan Sultan Abdurrahman	23.480.670.000
6	1.266 m2	Jalan Uray Bawadi	7.128.427.000
7	599 m2	Jalan K.S Tubun Gg. Flamboyan No.4 Pontianak	746.000
Jumlah			48.759.467.000

Tanah seluas tersebut merupakan tanah yang digunakan untuk gedung kantor dan rumah dinas Pengadilan Negeri Pontianak.

Rincian Tanah beserta akumulasi penyusutannya per 30 Juni 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin
Rp6.401.620.966*
6

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp6.401.620.966 dan Rp6.401.620.966.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel X
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Perolehan 1 Januari Tahun 2025	6.401.620.966
Mutasi Tambah :	
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Hibah	0
Koreksi Tambah	0

Mutasi Kurang	
Penghentian Aset dari Penggunaan	0
Saldo per 30 Juni Semester 1 Tahun 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni Semester 1 Tahun 2025	0
Nilai Buku per 30 Juni Semester 1 Tahun 2025	6.401.620.966

Mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain adalah sebagai berikut :

Rincian Peralatan dan Mesin beserta akumulasi penyusutannya per 30 Juni 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Gedung dan
Bangunan
Rp13.617.846.7
00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan merupakan aset tetap. Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp13.617.846.700 dan Rp13.617.846.700 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel XI
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Saldo Perolehan 30 Juni 2025	13.617.846.700
Mutasi Tambah :	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0
Reklas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Mutasi Kurang	
-	0
Saldo per 30 Juni Semester 1 Tahun 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni Semester 1 Tahun 2025	0
Nilai Buku per 30 Juni Semester 1 Tahun 2025	13.617.846.700

Tidak terdapat penambahan nilai Gedung dan Bangunan pada Semester 1 Tahun 2025 dibandingkan Tahun ini

Rincian Gedung dan Bangunan beserta akumulasi penyusutannya per 30 Juni 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp0*

Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel XI
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan
(dalam rupiah)

Saldo Perolehan 1 Januari Tahun 2025	0
Mutasi Tambah :	
-	
Mutasi Kurang	
Reklas ke Klasifikasi Gedung dan Bangunan	0
Saldo per 30 Juni Semester 1 Tahun 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	0
Nilai Buku per 30 Juni 2025	0

Terdapat pengurangan jenis aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun ini karena adanya Reklasifikasi ke dalam Kelompok Aset Gedung dan Bangunan..

Rincian Jalan, Irigasi , dan Jaringan beserta akumulasi penyusutannya per 30 Juni 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap
Lainnya
Rp9.839.869

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.839.869 dan Rp9.839.869 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel XI
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Perolehan 30 Juni Semester 1 Tahun 2025	3.114.864
Mutasi Tambah :	
-	
Mutasi Kurang	
-	0
Saldo per 30 Juni Semester 1 Tahun 2025	3.114.864
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	0
Nilai Buku per 30 Juni 2025	3.114.864

Tidak terdapat penambahan maupun pengurangan jenis aset tetap lainnya pada tahun ini.

Rincian Aset Tetap Lainnya beserta akumulasi penyusutannya per 30 Juni 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C.2.5. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi
Penyusutan
Rp13.587.620.390
90

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Juni 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp13.587.620.390 dan Rp12.894.428.365. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah

dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025:

Tabel XII
Rincian Akumulasi Penyusutan

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	AKM. Peyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	48.759.467.000	0	48.759.467.000
2	Peralatan dan Mesin	6.401.620.966	(5.492.725.189)	908.895.777
3	Gedung dan Bangunan	13.617.846.700	(8.094.895.201)	5.522.951.499
4	Jalan, Irigasi, dan Bangunan	0	0	0
5	Aset tetap Lainnya	9.839.869	0	9.839.869
Jumlah		68.788.774.535	13.587.620.390	55.201.154.145

Rincian akumulasi penyusutan per 30 Juni 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C.3. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek
Rp1.022.195.451
1*

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.022.195.451 dan Rp6.791.033.

C.3.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp960.995.451*

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni Semester 1 Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp960.995.451 dan Rp5.964.200. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga

pada Lingkup Kantor Pengadilan Negeri Pontianak per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel XIII
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Semester 1 Tahun 2025
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	925.855.451
2	Belanja Barang yang Masih Harus dibayar	35.140.000
Jumlah		960.995.451

Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan Belanja Pegawai yang masih harus dibayarkan dan Belanja Barang yang masih harus dibayarkan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai berupa gaji Induk PNS bulan Juli 2025 yang ajukan pada bulan Juni 2025;
2. Belanja Barang berupa Tagihan Air, Telpon, Internet yang merupakan merupakan pemakaian bulan Juni 2025 yang dibatarkan pada bulan Juli 2025.

C.3.2. Utang Yang Belum Ditagihkan

*Utang Yang
Belum
Ditagihkan Rp0*

Utang yang belum ditagihkan merupakan utang akrual saat Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pihak ketiga. Pengakuan hutang ini dicatat oleh Satker dengan dokumen sumber BAST/Surat Penagihan/kuitansi UP yang belum di SPM kan. Utang yang belum ditagihkan per 30 Juni Tahun 2024 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.200.000 dan Rp0. Adapun rincian utang yang belum ditagihkan adalah sebagai berikut:

Tabel XIV
Rincian Utang yang belum ditagihkan Semester 1 Tahun 2025
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kuitansi UP yang belum di SPMkan	1.200.000

Jumlah	1.200.000
--------	-----------

Kuitansi UP yang belum di SPMkan merupakan bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan kepada KPPN yang dicatat sebagai pengeluaran kas oleh Bendahara Pengeluaran serta tercatat sebagai pengeuaran akrual oleh Neraca.

C.3.3. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN
Rp60.000.000*

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp60.000.000 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Adapun rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut:

Tabel XV
Rincian Uang Muka dari KPPN TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Uang Persediaan (UP)	60.000.000
2	Tambahan Uang Persediaan (TUP)	0
Jumlah		60.000.000

C.4. Ekuitas

*Ekuitas
Rp54.290.213.9
13*

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni Semester 1 Tahun 2025 adalah masing-masing sebesar Rp54.290.213.913 dan Rp55.947.662.237. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
Negara Buka*

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pajak
Rp6.548.066

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni Tahun 2024 adalah sebesar Rp6.548.066 dan Rp132.363.194.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp8.852.600.958

Jumlah Beban Pegawai pada per 30 Juni 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.852.600.958 dan Rp7.057.853.446. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Adapun rincian Beban pegawai per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel XVI

Rincian Perbandingan Beban Pegawai
Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Semester 1 Tahun 2025	Tahun 2024	%
Beban Gaji Pokok	2.002470.480	1.814.556.180	
Pengem. Beban Pembulatan	0	(1.528)	
Beban Pembulatan	25.767	23.399	
Beban Tunj. Suami/Istri	124.178.920	128.037.290	
Beban Tunj. Anak	48.658.682	44.751.606	
Beban Tunj. Struktural	25.920.000	25.920.000	
Beban Tunj. Fungsional	416.420.000	1.709.280.000	
Beban Tunj. PPh	65.891.603	308.637.975	
Beban Tunj. Beras	103.560.600	97.260.060	
Beban Uang Makan	193.329.000	165.836.000	
Pengem. Beban Uang Makan PNS	0	0	
Beban Tunj. Umum	34.170.000	26.230.000	

Pengem. Beban Tunj. Umum	0	0	
Beban Tunj. Kemahalan Hakim	128.250.000	90.450.000	
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	2.484.955.000	2.610.500.000	
Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2.637.400.000	0	
Beban Gaji Pokok PPPK	25.729.200	25.729.200	
Beban Pembulatan Gaji PPPK	786	0	
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2.572.920	2.572.920	
Beban Tunjangan Anak PPPK	971.992	514.584	
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	3.150.000	3.150.000	
Beban Tunjangan Beras PPPK	2.534.700	1.955.340	
Beban Uang Makan PPPK	2.905.000	2.450.000	
Jumlah Beban	8.882.600.958	7.057.853.446	

Kenaikan Beban Pegawai sesuai rincian perbandingan diatas terdapat pada sebagian besar beban tunjangan, antara lain Beban Tunjangan Gaji Pokok, Beban Tunjangan Struktural, Tunjangan Fungsional, Tunjangan PPH dan Tunjangan Kemahalan Hakim, dan lainnya. Hal ini disebabkan oleh :

1. Adanya kenaikan Jumlah Pegawai dan Kenaikan Tunjangan Pejabat Negara di awal tahun 2025.;

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp55.581.500*

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni Semester 1 Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp55.581.500 dan Rp42.078.300. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel XVII
Rincian Perbandingan Beban Persediaan
Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Semester 1 Tahun 2025	Tahun 2024	%
Beban Persediaan Konsumsi	55.581.500	42.078.300	32
Jumlah Beban	55.581.500	42.078.300	32

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp424.025.206*

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni Semester 1 Tahun 2025 adalah masing-masing sebesar Rp424.025.206 dan Rp487.933.757. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Berikut rincian perbandingan beban barang dan jasa per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 :

Tabel XVIII
Rincian Perbandingan Beban Barang dan Jasa
Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Semester 1 Tahun 2025	Tahun 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	292.738.465	377.553.609	(28,97)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.058.990	422.500	91,64
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	22.450.000	13.648.000	39,20
Beban Barang Operasional Lainnya	22.077.225	8.713.000	60,53
Beban Bahan	300.000	0	100

Beban Peralatan dan Mesin- Ekstrakomptabel	700.000	0	100
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	20.300.000	0
Beban Langganan Listrik	0	0	0
Beban Langganan Telepon	1.139.526	906.648	20,43
Beban Langganan Air	7.456.000	9.405.000	(26,14)
Beban Sewa	72.105.000	56.985.000	20,96
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0
Jumlah Beban	424.025.206	487.933.757	(13)

Penurunan Beban barang dan Jasa di hampir terjadi di seluruh rincian, dikarenakan sebagai berikut :

1. Turunnya Beban Barang Non Operasional lainnya disebabkan oleh karena perpindahan dimana sebelumnya belanja keperluan sehari-hari kantor lainnya berpindah kedalam akun detail Beban Keperluan Perkantoran;
2. Turunnya Beban Barang Maupun Jasa Langganan Listrik terjadi dikarenakan tagihan Listrik satker telah diambil alih oleh Eselon 1 sehingga tidak ada lagi Beban tersebut pada Tahun ini;

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp651.630.400*

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp651.630.400 dan Rp552.512.250. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel IXX
Rincian Perbandingan Pemeliharaan
Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Semester 1 Tahun 2025	Tahun 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	485.980.500	413.466.000	14,92
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	14.150.000	22.210.000	(56,96)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	128.334.300	104.988.350	18,19
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	23.165.600	11.847.900	48,85
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah Beban	651.630.400	552.512.250	17,94

Kenaikan Beban Pemeliharaan disebabkan karena bertambahnya kegiatan pemeliharaan yang dilakukan pada tahun ini, begitu juga Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin naik diakibatkan meningkatnya frekuensi penggunaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan peralatan mesin TIK sudah 4 (empat) tahun dalam penggunaan sehingga memerlukan pemeliharaan lebih tinggi dari sebelumnya.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp17.427.196

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp17.427.196 dan Rp32.940.539. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi secara offline dan adanya pelatihan dari Tingkat Banding dan KPPN/KPKNL serta adanya efisiensi terhadap akun perjalanan dinas pada tahun 2025. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel XX
Rincian Perbandingan Perjalanan Dinas
Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Semester 1 Tahun 2025	Tahun 2024	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	16.827.196	29.790.539	(77)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000	3.150.000	(425)
Jumlah Beban	17.427.196	32.940.539	(47)

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp693.192.025*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp693.192.025 dan Rp718.088.426. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel XXI
Rincian Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Semester 1 Tahun 2025	Tahun 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan mesin	187.977.775	202.898.023	(7,93)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	505.214.250	515.190.403	(1,97)

Beban Penyusutan Jaringan	0	0	0
Jumlah Penyusutan	693.192.025	718.088.428	(3,46)
-	-	-	-
Jumlah Amortisasi	0	0	0
Jumlah Beban	693.192.025	718.088.428	(3,46)

D.8. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional Rp0

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel XXII
Rincian Perbandingan Kegiatan Non Operasional
Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Semester 1 Tahun 2025	Tahun 2024	%
Kegiatan Non Operasional	0	0	0
Jumla	0	0	0

D.9. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari pos luar biasa untuk periode per 30 Juni 2025 dan per 30 Juni Semester 1 Tahun 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp55.947.662.237
37

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 masing-masing adalah sebesar Rp55.947.662.237 dan Rp62.225.668.806.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Defisit-LO
Rp10.687.909.219
19

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2025 dan 30 Juni Semester 1 Tahun 2025 masing-masing adalah defisit sebesar Rp10.687.909.219 dan Rp8.879.043.524. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Rp0

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0.

E.4. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas Rp0

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset yang mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

E.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp9.030.460.895
5

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 30 Juni Semester 1 Tahun 2025 masing-masing adalah sebesar Rp9.030.460.895 dan Rp7.325.027.751.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel XXIII
Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	9.035.364.809
Diterima Dari Entitas Lain	4.903.914
Transfer Masuk	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	9.030.460.895

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DDEL sebesar Rp4.903.914 sedangkan DKEL sebesar Rp9.035.364.809.

E.5.2. Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp0 terdiri dari:

Tabel XXIV
Rincian Transfer Masuk per 30 Juni 2025

(dalam rupiah)

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Peralatan dan Mesin	Biro Umum MA RI	0
Jumlah		0

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp0

E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp54.290.213.9
13

Nilai Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp54.290.213.913 dan Rp60.671.653.033.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadia Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca

F.2 Pengungkapan Lain-lain

Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor: 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 Tanggal 1 Desember 2024 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya Tahun Anggaran 2025 jo Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Prngguna Barang Nomor: 106/SEK.PN/W17-U1/KU1.1.1/1/2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Pengadilan Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2025, tidak terdapat perubahan hingga akhir Semester 1 Tahun 2025.

2. Saldo Rekening Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pontianak bulan Juni 2025 Dipa 01 (Badan Urusan Administrasi) Nomor Rekening 653240992391000 pada PT.BANK RAKYAT INDONESIA CAB.PONTIANAK Atas Nama Rekening BPG 042 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK Rp.39.187.000,-.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK 099066

Tgl Data : 30/07/25 7:09 AM
 Tgl Cetak : 30/07/25 9:20 AM
 Halaman : 2
 lap_ira_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
	2	4	5	6	7	8	9	10
1								
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	14,535,495,000	9,035,364,809	(5,500,130,191)	62.16	13,792,325,000	7,336,295,634	(6,456,030,366)	53.19
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 30 Juli 2025
 Penanggung Jawab UAKPA



Yuhar Nelly, ST, MM
 NIP. 197706242006042001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 1300 **KALIMANTAN BARAT**
SATUAN KERJA : 099066 **PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 31/07/25 3:20 PM
 Halaman : 1
 Prtg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 31/7/25 2:21 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA		% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	
				BELANJA	BELANJA NETTO			
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
51111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3,140,470,000	1,438,114,000	1,769,865,440	0	1,769,865,440	123.07	(331,751,440)
5111119	Belanja Gaji Pokok PNS	39,000	38,000	22,757	0	22,757	59.89	15,243
5111121	Belanja Pembulatan Gaji PNS	285,121,000	212,145,000	110,470,040	0	110,470,040	52.07	101,674,960
5111122	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	75,200,000	75,200,000	43,345,122	0	43,345,122	57.64	31,854,878
5111123	Belanja Tunj. Anak PNS	40,320,000	40,320,000	23,040,000	0	23,040,000	57.14	17,280,000
5111124	Belanja Tunj. Struktural PNS	3,524,750,000	482,660,000	407,740,000	0	407,740,000	84.48	74,920,000
5111125	Belanja Tunj. Fungsional PNS	691,950,000	92,693,000	65,805,201	0	65,805,201	70.99	26,887,799
5111126	Belanja Tunj. Beras PNS	152,411,000	152,411,000	91,828,560	0	91,828,560	60.25	60,582,440
5111129	Belanja Uang Makan PNS	415,800,000	415,800,000	197,224,000	0	197,224,000	47.43	218,576,000
5111151	Belanja Tunjangan Umum PNS	28,140,000	52,140,000	29,400,000	0	29,400,000	56.39	22,740,000
5111157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	226,800,000	226,800,000	112,050,000	0	112,050,000	49.4	114,750,000
5111158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	2,821,000,000	3,379,000,000	2,224,955,000	0	2,224,955,000	65.85	1,154,045,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	11,402,001,000	6,567,321,000	5,075,746,120	0	5,075,746,120	77.29	1,491,574,880
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	0	838,127,000	499,828,599	0	499,828,599	59.64	338,298,401
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	0	4,448,279,000	2,321,100,000	0	2,321,100,000	52.18	2,127,179,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	0	5,286,406,000	2,820,928,599	0	2,820,928,599	53.36	2,465,477,401
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	37,070,000	37,070,000	22,870,400	0	22,870,400	61.7	14,199,600
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9,000	9,000	688	0	688	7.64	8,312
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,704,000	3,704,000	2,287,040	0	2,287,040	61.75	1,416,960
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,480,000	1,480,000	857,640	0	857,640	57.95	622,360
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,900,000	4,900,000	2,800,000	0	2,800,000	57.14	2,100,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,054,000	4,054,000	2,245,020	0	2,245,020	55.38	1,808,980
511628	Belanja Uang Makan PPPK	8,400,000	8,400,000	2,905,000	0	2,905,000	34.58	5,495,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	59,617,000	59,617,000	33,965,788	0	33,965,788	56.97	25,651,212
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	11,461,618,000	11,913,344,000	7,930,640,507	0	7,930,640,507	66.57	3,982,703,493
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	938,541,000	916,041,000	257,598,465	0	257,598,465	28.12	658,442,535
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,000,000	18,000,000	5,058,990	0	5,058,990	28.11	12,941,010
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	78,120,000	57,120,000	22,450,000	0	22,450,000	39.3	34,670,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5,000,000	26,077,000	20,877,225	0	20,877,225	80.06	5,199,775

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 ESELON I : 01 WILAYAH/PROVINSI : 1300 SATUAN KERJA : 099066 JENIS SATUAN KERJA : KD	MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI KALIMANTAN BARAT PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
---	--

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 31/07/25 3:20 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 31/7/25 2:21 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,039,661,000	1,017,238,000	305,984,680	0	305,984,680	30.08	711,253,320
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	300,000	300,000	300,000	0	300,000	100	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	700,000	700,000	0	700,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	95,760,000	80,703,000	69,077,900	0	69,077,900	85.6	11,625,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	95,760,000	80,703,000	69,077,900	0	69,077,900	85.6	11,625,100
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	4,800,000	4,800,000	1,139,526	0	1,139,526	23.74	3,660,474
522113	Belanja Langganan Air	27,000,000	27,000,000	9,525,200	0	9,525,200	35.28	17,474,800
522141	Belanja Sewa	256,790,000	256,790,000	72,105,000	0	72,105,000	28.08	184,685,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	288,590,000	288,590,000	82,769,726	0	82,769,726	28.68	205,820,274
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	574,750,000	629,915,000	485,980,500	0	485,980,500	77.15	143,934,500
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	84,000,000	84,000,000	14,150,000	0	14,150,000	16.85	69,850,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	240,530,000	242,970,000	128,334,300	0	128,334,300	52.82	114,635,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	899,280,000	956,885,000	628,464,800	0	628,464,800	65.68	328,420,200
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	93,500,000	73,375,000	16,827,196	0	16,827,196	22.93	56,547,804
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,300,000	9,300,000	600,000	0	600,000	6.45	8,700,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	102,800,000	82,675,000	17,427,196	0	17,427,196	21.08	65,247,804
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,427,091,000	2,427,091,000	1,104,724,302	0	1,104,724,302	45.52	1,322,366,698
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195,060,000	195,060,000	0	0	0	0	195,060,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195,060,000	195,060,000	0	0	0	0	195,060,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	195,060,000	195,060,000	0	0	0	0	195,060,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	195,060,000	195,060,000	0	0	0	0	195,060,000
	JUMLAH BELANJA	14,083,769,000	14,535,495,000	9,035,364,809	0	9,035,364,809	62.16	5,500,130,191

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
 ESELON I : 01
 WILAYAH/PROVINSI : 1300
 SATUAN KERJA : 099066
 JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 KALIMANTAN BARAT
 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 31/07/25 7:49 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_ira_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 21/5/25 10:37 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3,140,470,000	3,140,470,000	1,610,023,860	0	1,610,023,860	51.27	1,530,446,140
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	39,000	39,000	20,939	1,528	19,411	49.77	19,589
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	285,121,000	285,121,000	114,228,800	0	114,228,800	40.06	170,892,200
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	75,200,000	75,200,000	39,847,804	0	39,847,804	52.99	35,352,196
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	40,320,000	40,320,000	23,040,000	0	23,040,000	57.14	17,280,000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	3,524,750,000	3,524,750,000	1,520,330,000	0	1,520,330,000	43.13	2,004,420,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	691,950,000	691,950,000	284,046,436	0	284,046,436	41.05	407,903,564
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	152,411,000	152,411,000	86,469,480	0	86,469,480	56.73	65,941,520
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	415,800,000	415,800,000	168,917,000	0	168,917,000	40.62	246,883,000
511129	Belanja Uang Makan PNS	28,140,000	28,140,000	22,740,000	0	22,740,000	80.81	5,400,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	226,800,000	226,800,000	76,950,000	0	76,950,000	33.93	149,850,000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	2,821,000,000	2,821,000,000	2,330,000,000	0	2,330,000,000	82.59	491,000,000
511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	11,402,001,000	11,402,001,000	6,276,614,319	1,528	6,276,612,791	55.05	5,125,388,209
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111							
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	37,070,000	37,070,000	22,870,400	0	22,870,400	61.7	14,199,600
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	9,000	9,000	398	0	398	4.42	8,602
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,704,000	3,704,000	2,287,040	0	2,287,040	61.75	1,416,960
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,480,000	1,480,000	457,408	0	457,408	30.91	1,022,592
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	4,900,000	4,900,000	2,800,000	0	2,800,000	57.14	2,100,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,054,000	4,054,000	1,738,080	0	1,738,080	42.87	2,315,920
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8,400,000	8,400,000	2,450,000	0	2,450,000	29.17	5,950,000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	59,617,000	59,617,000	32,603,326	0	32,603,326	54.69	27,013,674
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116							
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51							
		11,461,618,000	11,461,618,000	6,309,217,645	1,528	6,309,216,117	55.05	5,152,401,883
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional	858,498,000	858,498,000	342,163,059	0	342,163,059	40	513,334,941
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	18,000,000	18,000,000	130,500	0	130,500	0.73	17,869,500
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	54,960,000	54,960,000	13,648,000	0	13,648,000	24.83	41,312,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	31,400,000	31,400,000	8,713,000	0	8,713,000	25.33	25,687,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	962,858,000	962,858,000	364,654,559	0	364,654,559	37.87	598,203,441
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211							
5212	Belanja Barang Non Operasional	20,300,000	20,300,000	20,300,000	0	20,300,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : 1300 KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : 099066 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 31/07/25 7:49 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 21/5/25 10:37 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	20,300,000	20,300,000	20,300,000	0	20,300,000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	95,760,000	95,760,000	53,632,500	0	53,632,500	56.01	42,127,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	95,760,000	95,760,000	53,632,500	0	53,632,500	56.01	42,127,500
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	4,800,000	4,800,000	1,096,569	0	1,096,569	22.85	3,703,431
522113	Belanja Langganan Air	27,000,000	27,000,000	11,083,000	0	11,083,000	41.05	15,917,000
522141	Belanja Sewa	217,910,000	217,910,000	56,985,000	0	56,985,000	26.15	160,925,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	249,710,000	249,710,000	69,164,569	0	69,164,569	27.7	180,545,431
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	574,750,000	574,750,000	366,566,000	0	366,566,000	63.78	208,184,000
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	84,000,000	84,000,000	22,210,000	0	22,210,000	26.44	61,790,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	240,530,000	240,530,000	97,911,350	0	97,911,350	40.71	142,618,650
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	899,280,000	899,280,000	486,687,350	0	486,687,350	54.12	412,592,650
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	93,500,000	93,500,000	29,790,539	0	29,790,539	31.86	63,709,461
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,300,000	9,300,000	2,850,000	0	2,850,000	30.65	6,450,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	102,800,000	102,800,000	32,640,539	0	32,640,539	31.75	70,159,461
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,330,708,000	2,330,708,000	1,027,079,517	0	1,027,079,517	44.07	1,303,628,483
	JUMLAH BELANJA	13,792,326,000	13,792,326,000	7,336,297,162	1,528	7,336,295,634	53.19	6,456,030,366

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 30/07/25 7:09 AM
Tgl Cetak : 30/07/25 9:20 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	60,000,000	0	60,000,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	817,319	0	817,319	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	817,319	0	817,319	0.00
Persediaan	50,437,900	60,107,100	(9,669,200)	(16.09)
JUMLAH ASET LANCAR	111,255,219	60,107,100	51,148,119	85.09
ASET TETAP				
Tanah	48,759,467,000	48,759,467,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	6,401,620,966	6,401,620,966	0	0.00
Gedung dan Bangunan	13,617,846,700	13,617,846,700	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	9,839,869	9,839,869	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(13,587,620,390)	(12,894,428,365)	(693,192,025)	5.38
JUMLAH ASET TETAP	55,201,154,145	55,894,346,170	(693,192,025)	(1.24)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	3,114,864	3,114,864	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(3,114,864)	(3,114,864)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	55,312,409,364	55,954,453,270	(642,043,906)	(1.15)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	960,995,451	5,964,200	955,031,251	16,012.73
Utang Yang Belum Ditagihkan	1,200,000	0	1,200,000	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0	826,833	(826,833)	(100.00)
Uang Muka dari KPPN	60,000,000	0	60,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,022,195,451	6,791,033	1,015,404,418	14,952.13
JUMLAH KEWAJIBAN	1,022,195,451	6,791,033	1,015,404,418	14,952.13
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	54,290,213,913	55,947,662,237	(1,657,448,324)	(2.96)
JUMLAH EKUITAS	54,290,213,913	55,947,662,237	(1,657,448,324)	(2.96)
JUMLAH EKUITAS	54,290,213,913	55,947,662,237	(1,657,448,324)	(2.96)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	55,312,409,364	55,954,453,270	(642,043,906)	(1.15)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

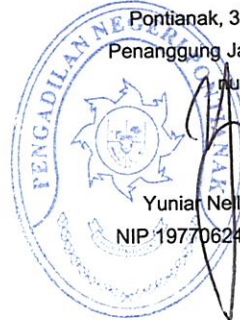
Tgl Data : 30/07/25 7:09 AM
Tgl Cetak : 30/07/25 9:20 AM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :
FINAL

Pontianak, 30 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Full

Yuniar Nelly, ST,MM
NIP. 197706242006042001



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2025
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 30/07/25 6:26 AM

Tgl Cetak : 30/07/25 9:21 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	9,035,364,809
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	4,903,914	0
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	4,903,914
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,769,865,440	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22,757	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	110,470,040	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	43,345,122	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	23,040,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	407,740,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	65,805,201	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	91,828,560	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	197,224,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	29,400,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	112,050,000	0
3.0	511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	2,224,955,000	0
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	499,828,599	0
3.0	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2,321,100,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	22,870,400	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	688	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,287,040	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	857,640	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2,800,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,245,020	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	2,905,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	257,598,465	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,058,990	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	22,450,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	20,877,225	0
3.0	521211	Belanja Bahan	300,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	69,077,900	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,139,526	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	9,525,200	0
3.0	522141	Belanja Sewa	72,105,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	485,980,500	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	14,150,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	128,334,300	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,827,196	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 30/07/25 6:26 AM

Tgl Cetak : 30/07/25 9:21 AM

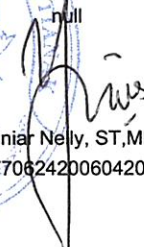
Halaman : 2


lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	0
JUMLAH			9,040,268,723	9,040,268,723

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 30 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
null

Yuniar Nelly, ST,MM
197706242006042001



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 30/07/25 7:09 AM

Tgl Cetak : 30/07/25 9:21 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	60,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	817,319	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	30,593,600	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	19,844,300	0
0.0	131111	Tanah	48,759,467,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	6,401,620,966	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	13,617,846,700	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	9,839,869	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	5,492,725,189
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	8,094,895,201
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,114,864	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	3,114,864
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	925,855,451
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	35,140,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	1,200,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	60,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	9,035,364,809
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	4,903,914	0
0.0	391111	Ekuitas	0	55,947,662,237
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	29,800,000	0
0.0	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	29,800,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	826,833
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	5,721,233
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,002,470,480	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	25,767	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	124,178,920	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	48,658,682	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,920,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	416,420,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	65,891,603	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	103,560,600	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	193,329,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	34,170,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	128,250,000	0
3.0	511158	Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	2,484,955,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	549,506,308	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2,637,400,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	25,729,200	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2025
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 30/07/25 7:09 AM
 Tgl Cetak : 30/07/25 9:21 AM
 Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	786	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,572,920	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	971,992	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	3,150,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	2,534,700	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	2,905,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	292,738,465	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,058,990	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	22,450,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	22,077,225	0
3.0	521211	Beban Bahan	300,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,139,526	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	7,456,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	72,105,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	485,980,500	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	14,150,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	128,334,300	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	16,827,196	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	187,977,775	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	505,214,250	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	55,581,500	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	23,165,600	0
JUMLAH			79,632,305,817	79,632,305,817

Keterangan :
 FINAL

Pontianak, 30 Juli 2025
 Penanggung Jawab UAKPA
 null

 Yuniar Nelly, ST,MM
 NIP 197706242006042001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2024
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 21/05/25 8:14 PM

Tgl Cetak : 31/07/25 8:09 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	60,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	1,095,311	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	20,656,000	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	19,456,000	0
0.0	131111	Tanah	54,166,769,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	5,628,040,966	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	13,877,226,700	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	9,839,869	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,982,794,634
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	7,224,132,850
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,114,864	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	3,114,864
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	751,718,329
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	33,000,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	59,785,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	60,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	7,336,295,634
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	11,267,883	0
0.0	391111	Ekuitas	0	62,225,668,806
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	12,363,194
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,814,556,180	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	21,871	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	128,037,290	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	44,751,606	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,920,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,709,280,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	308,637,975	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	97,260,060	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	165,836,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	26,230,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	90,450,000	0
3.0	511158	Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	2,610,500,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	25,729,200	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	420	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,572,920	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	514,584	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	3,150,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	1,955,340	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 21/05/25 8:14 PM

Tgl Cetak : 31/07/25 8:09 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	2,450,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	377,553,609	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	422,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	13,648,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	8,713,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	20,300,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	906,648	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	9,405,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	56,985,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	413,466,000	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	22,210,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	104,988,350	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	29,790,539	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,150,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	202,898,023	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	515,190,403	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	42,078,300	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	11,847,900	0
JUMLAH			82,688,873,311	82,688,873,311

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 31 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
null

Yuniar Nelly, ST,MM
NIP 197706242006042001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099066 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl.Data : 30/07/25 6:26 AM
Tgl.Cetak : 30/07/25 10:38 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	30,593,600
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	19,844,300
131111	Tanah	48,759,467,000
132111	Peralatan dan Mesin	6,401,620,966
133111	Gedung dan Bangunan	13,617,846,700
135121	Aset Tetap Lainnya	9,839,869
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5,492,725,189)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(8,094,895,201)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,114,864
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(3,114,864)
J U M L A H		55,251,592,045



Pontianak, 15 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak

(Handwritten Signature)
YUNIAR NELLY, S.T., M.M.
197706242006042001

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

Tgl Data : 03/03/24 12:00 AM
Tgl Cetak : 30/07/25 10:49 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker_poc

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099066 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

KODE	URAIAN	SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025			
			KUAN- TITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUAN- TITAS	NILAI		
					6	7	8	9				
1	2	3	4	5						10	11	
131111	Tanah		9,850	48,759,467,000	4,153	30,609,097,000	4,153	30,609,097,000	9,850	48,759,467,000	9,850	48,759,467,000
20101	TANAH PERSIL	-	9,850	48,759,467,000	4,153	30,609,097,000	4,153	30,609,097,000	9,850	48,759,467,000	9,850	48,759,467,000
132111	Peralatan dan Mesin		1,208	6,474,699,132	1	700,000	0	700,000	1,209	6,475,399,132	1,209	6,475,399,132
30103	ALAT BANTU	-	2	267,663,000	0	0	0	0	2	267,663,000	2	267,663,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	10	1,815,743,941	0	0	0	0	10	1,815,743,941	10	1,815,743,941
30501	ALAT KANTOR	-	175	511,807,688	0	0	0	0	175	511,807,688	175	511,807,688
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	747	1,809,578,895	0	0	0	0	747	1,809,578,895	747	1,809,578,895
30601	ALAT STUDIO	-	60	336,358,820	0	0	0	0	60	336,358,820	60	336,358,820
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	23	56,676,100	0	0	0	0	23	56,676,100	23	56,676,100
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	1	1,900,000	0	0	0	0	1	1,900,000	1	1,900,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	101	1,305,250,036	0	0	0	0	101	1,305,250,036	101	1,305,250,036
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	89	369,720,652	1	700,000	0	0	90	370,420,652	90	370,420,652
133111	Gedung dan Bangunan		18	13,640,844,200	2	12,083,693,700	2	12,083,693,700	18	13,640,844,200	18	13,640,844,200
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	6	12,308,257,200	2	12,083,693,700	2	12,083,693,700	6	12,308,257,200	6	12,308,257,200
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	12	1,332,587,000	0	0	0	0	12	1,332,587,000	12	1,332,587,000
135121	Aset Tetap Lainnya		30	9,839,869	0	0	0	0	30	9,839,869	30	9,839,869
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	30	9,839,869	0	0	0	0	30	9,839,869	30	9,839,869
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		22	3,679,973	0	0	0	0	22	3,679,973	22	3,679,973
30501	ALAT KANTOR	-	13	1,855,604	0	0	0	0	13	1,855,604	13	1,855,604
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	8	597,869	0	0	0	0	8	597,869	8	597,869
30601	ALAT STUDIO	-	1	1,226,500	0	0	0	0	1	1,226,500	1	1,226,500
TOTAL				68,888,530,174		42,693,490,700		42,692,790,700		68,889,230,174		68,889,230,174

Pontianak, 30 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak



[Handwritten Signature]

YUNIAR NELLY S.T., M.M.

197706242006042001

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

Tgl Data : 30/07/25 6:26 AM
Tgl Cetak : 30/07/25 11:45 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker_poc

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099066 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2025	
			KUAN- TITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUAN- TITAS	NILAI
					KUAN- TITAS	NILAI	KUAN- TITAS	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah	-	9,850	48,759,467,000	4,153	30,809,097,000	4,153	30,809,097,000	9,850	48,759,467,000
20101	TANAH PERSIL	-	9,850	48,759,467,000	4,153	30,809,097,000	4,153	30,809,097,000	9,850	48,759,467,000
132111	Peralatan dan Mesin	-	999	6,401,620,966	0	0	0	0	999	6,401,620,966
30103	ALAT BANTU	-	2	267,663,000	0	0	0	0	2	267,663,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	10	1,815,743,941	0	0	0	0	10	1,815,743,941
30501	ALAT KANTOR	-	159	508,876,842	0	0	0	0	159	508,876,842
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	578	1,745,358,575	0	0	0	0	578	1,745,358,575
30601	ALAT STUDIO	-	60	336,358,820	0	0	0	0	60	336,358,820
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	8	54,089,100	0	0	0	0	8	54,089,100
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	1	1,900,000	0	0	0	0	1	1,900,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	101	1,305,250,036	0	0	0	0	101	1,305,250,036
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	80	366,400,652	0	0	0	0	80	366,400,652
133111	Gedung dan Bangunan	-	16	13,617,846,700	2	12,083,693,700	2	12,083,693,700	16	13,617,846,700
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	5	12,290,441,700	2	12,083,693,700	2	12,083,693,700	5	12,290,441,700
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	11	1,327,405,000	0	0	0	0	11	1,327,405,000
135121	Aset Tetap Lainnya	-	30	9,839,869	0	0	0	0	30	9,839,869
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	30	9,839,869	0	0	0	0	30	9,839,869
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-	15	3,114,864	0	0	0	0	15	3,114,864
30501	ALAT KANTOR	-	13	1,855,604	0	0	0	0	13	1,855,604
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1	32,760	0	0	0	0	1	32,760
30601	ALAT STUDIO	-	1	1,226,500	0	0	0	0	1	1,226,500
TOTAL				68,791,889,399		42,692,790,700		42,692,790,700		68,791,889,399



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2025
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 30/07/25 7:09 AM

Tgl Cetak : 30/07/25 9:20 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	6,548,066	12,363,194	(5,815,128)	(47.036)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	6,548,066	12,363,194	(5,815,128)	(47.036)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	6,548,066	12,363,194	(5,815,128)	(47.036)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	8,852,600,958	7,057,853,446	1,794,747,512	25.429
Beban Persediaan	55,581,500	42,078,300	13,503,200	32.091
Beban Barang dan Jasa	424,025,206	487,933,757	(63,908,551)	(13.098)
Beban Pemeliharaan	651,630,400	552,512,250	99,118,150	17.94
Beban Perjalanan Dinas	17,427,196	32,940,539	(15,513,343)	(47.095)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 30/07/25 7:09 AM

Tgl Cetak : 30/07/25 9:20 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	693,192,025	718,088,426	(24,896,401)	(3.467)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	10,694,457,285	8,891,406,718	1,803,050,567	20.279
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(10,687,909,219)	(8,879,043,524)	(1,808,865,695)	20.372
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(10,687,909,219)	(8,879,043,524)	(1,808,865,695)	20.372
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(10,687,909,219)	(8,879,043,524)	(1,808,865,695)	20.372

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 30 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA



null

Yuniar Nelly, ST,MM

NIP 197706242006042001

**RINCIAN BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN PNS TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2025**

calc_lo_akun_satker_poc

Akun	Uraian	Jumlah
511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,002,470,480
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	25,767
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	124,178,920
511122	Beban Tunj. Anak PNS	48,658,682
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,920,000
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	416,420,000
511125	Beban Tunj. PPh PNS	65,891,603
511126	Beban Tunj. Beras PNS	103,560,600
511129	Beban Uang Makan PNS	193,329,000
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	34,170,000
511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	128,250,000
511158	Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	2,484,955,000
511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	549,506,308
511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2,637,400,000
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	25,729,200
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	786
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,572,920
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	971,992
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	3,150,000
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	2,534,700
511628	Beban Uang Makan PPPK	2,905,000
JUMLAH		8,852,600,958

**RINCIAN BEBAN PERSEDIAAN TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2025**

calc_lo_akun_satker_poc

Akun	Uraian	Jumlah
593111	Beban Persediaan konsumsi	55,581,500
JUMLAH		55,581,500

**RINCIAN BEBAN BARANG OPERASIONAL TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2025**

calc_lo_akun_satker_poc

Akun	Uraian	Jumlah
521111	Beban Keperluan Perkantoran	292,738,465
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,058,990
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	22,450,000
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	22,077,225
521211	Beban Bahan	300,000
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000
522112	Beban Langganan Telepon	1,139,526
522113	Beban Langganan Air	7,456,000
522141	Beban Sewa	72,105,000
JUMLAH		424,025,206

**RINCIAN BEBAN BARANG OPERASIONAL TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2024**

calc_lo_akun_satker_poc

Akun	Uraian	Jumlah
521111	Beban Keperluan Perkantoran	377,553,609
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	422,500
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	13,648,000
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	8,713,000
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	20,300,000
522112	Beban Langganan Telepon	906,648
522113	Beban Langganan Air	9,405,000
522141	Beban Sewa	56,985,000
JUMLAH		487,933,757

**RINCIAN BEBAN PEMELIHARAAN TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2025**

calc_lo_akun_satker_poc

Akun	Uraian	Jumlah
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	485,980,500
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	14,150,000
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	128,334,300
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	23,165,600
JUMLAH		651,630,400

**RINCIAN BEBAN PEMELIHARAAN TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2024**

calc_lo_akun_satker_poc

Akun	Uraian	Jumlah
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	413,466,000
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	22,210,000
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	104,988,350
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	11,847,900
JUMLAH		552,512,250

**RINCIAN BEBAN PERJALANAN DALAM NEGERI TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2025**

calc_lo_akun_satker_poc

Akun	Uraian	Jumlah
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	16,827,196
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000
JUMLAH		17,427,196

**RINCIAN BEBAN PERJALANAN DALAM NEGERI TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2024**

calk_lo_akun_satker_poc

Akun	Uraian	Jumlah
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	29,790,539
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,150,000
JUMLAH		32,940,539

**RINCIAN BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2025**

calc_lo_akun_satker_poc

Akun	Uraian	Jumlah
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	187,977,775
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	505,214,250
JUMLAH		693,192,025

**RINCIAN BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2024**

calk_lo_akun_satker_poc

Akun	Uraian	Jumlah
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	202,898,023
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	515,190,403
JUMLAH		718,088,426

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (099066) PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 30/07/25 6:26 AM

Tgl Cetak : 30/07/25 9:13 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	55,947,662,237	62,225,668,806	(6,278,006,569)	(10.09)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(10,687,909,219)	(8,879,043,524)	(1,808,865,695)	20.37
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	29,800,000	0	29,800,000	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(29,800,000)	0	(29,800,000)	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	9,030,460,895	7,325,027,751	1,705,433,144	23.28
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,657,448,324)	(1,554,015,773)	(103,432,551)	6.66
EKUITAS AKHIR	54,290,213,913	60,671,653,033	(6,381,439,120)	(10.52)

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 30 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

hull

Yuniar Nelly, ST,MM

NIP 197706242006042001



**RINCIAN KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2025**

calk_lpe_akun_satker_poc

Akun	Uraian	2025	2024
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-29,800,000	0
391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	29,800,000	0
JUMLAH		0	0

**RINCIAN TRANSAKSI ANTAR ENTITAS TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2025**

calk_lpe_akun_satker_por

Akun	Uraian	2025	2024
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	9,035,364,809	7,336,295,634
313121	Diterima dari Entitas Lain	-4,903,914	-11,267,883
313221	Transfer Masuk	0	0
JUMLAH		9,030,460,895	7,325,027,751

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210
 Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax: 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)
 BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK (099066)
 Rekening Induk : RKK BUA MA OPS (032901xxxxx304)
 Virtual Account : 653240990661000 | BPG 042 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
 Periode : 01-06-2025 s/d 30-06-2025

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2025-06-02	09:47:40	40102534	REGULAR_65324_0990661000	59.999.925,00	59.999.925,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2025-06-10	08:52:01	40291676	From 032901003295305 to 653240990661000 SETORAN_65324_0990661000 250421301008100000001 dari 032901003295305	0,00	0,00	2.167.223,00	2.167.223,00	SPAN	
2025-06-18	14:47:02	40545978	From 653240990661000 to 653240990661000 SETORAN_65324_0990661000 653240990661000 dari 653240990661000	2.167.223,00	0,00	17.775.000,00	19.942.223,00	BRIVA	
2025-06-19	11:05:18	40567878	REGULAR_65324_0990661000	19.942.223,00	17.775.000,00	0,00	2.167.223,00	TELLER_CARD	
2025-06-23	09:52:14	40659605	REGULAR_65324_0990661000 5534760300497104	2.167.223,00	2.167.223,00	0,00	0,00	ATM	
2025-06-24	13:52:20	40706389	From 653240990661000 to 653240990661000 SETORAN_65324_0990661000 653240990661000 dari 653240990661000	0,00	0,00	19.980.000,00	19.980.000,00	BRIVA	
2025-06-25	08:51:10	40720531	From 032901003295305 to 653240990661000 SETORAN_65324_0990661000 259991310117828000001 dari 032901003295305	19.980.000,00	0,00	60.000.000,00	79.980.000,00	SPAN	
2025-06-25	13:04:11	40743552	REGULAR_65324_0990661000	79.980.000,00	79.980.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2025-06-26	13:35:01	40788726	From 032901003295305 to 653240990661000 SETORAN_65324_0990661000 259991310115739000001 dari 032901003295305	0,00	0,00	39.187.000,00	39.187.000,00	SPAN	
Total Mutasi					159.922.148,00	139.109.223,00			
Saldo Akhir							39.187.000,00		